

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Sejumlah kiai di Indonesia turut andil dalam Pilpres (Pemilihan Presiden) pada tahun 2019 dengan menunjukkan dukungan kepada salah satu pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, baik untuk pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin dengan urutan nomor 01 hingga pasangan Prabowo-Sandiaga Uno dengan urutan nomor 02. Beberapa kiai yang memilih untuk berada di kubu Prabowo-Sandiaga Uno di antaranya adalah KH. Idrus Romli (Jember), KH. Hasib Wahab Chasbullah (Pondok Pesantren (PonPes) Tambak Beras Jombang), KH. Irfan Sidiq dan KH. Fahmi Sidiq (Pondok Pesantren Tebuireng Jombang), KH. KH. Mahfud Sobari (Mojokerto), KH. Umar Faruq atau Gus Mamak (Lumajang), KH. Lutfi Basori Alwi (Malang), KH. Fauzi Rozul (Pondok Pesantren Al-Amien Sumenep). (NN. "Ini Deretan Kiai NU di Jatim Pendukung Prabowo-Sandi". Moeslimchoice.com)

Sedangkan para kiai yang mengarahkan suaranya kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin di antaranya adalah KH. Anwar Manshur serta KH. Abdullah Kafabihi Mahrus (Pondok Pesantren Lirboyo Kediri), KH. Maimoen Zubair (PonPes Al-Anwar Sarang), KH. Dimiyati Rois (PonPes Al-Fadlu Kendal), KH. Zainuddin Djazuli (Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri), KH. Agus Ali Masyhuri (Pondok Pesantren Bumi Sholawat Sidoarjo), KH. Idris Hamid (Pondok Pesantren Baitul Hikmah Pasuruan), KH. Abdul Yajid (Pondok Pesantren Nuruh Huda Bogor), KH. Moh Hasan Mutawakkil Alallah (PonPes Zainul Hasan Genggong Probolinggo). (Nur Habibie. "400 Kiai serta Pengurus Pesantren se-Indonesia Dukung Jokowi-Ma'ruf Amin". Liputan6.com)

TPS/PASLON		Jokowi – Ma’ruf Amin	Prabowo - Sandi
Pesantren Gontor	TPS 9	6 suara	465 suara
	TPS 10	8 suara	300 suara
Pesantren Al Amien	TPS 18	19 suara	162 suara
	TPS 19	10 suara	370 suara
	TPS 20	7 suara	223 suara

Hasil dari Pilpres 2019 menunjukkan bahwa Prabowo menguasai mayoritas suara di beberapa pesantren. Prabowo unggul di 2 TPS yang ada di Mlarak, tepatnya di Pesantren Gontor Ponorogo. Hal yang sama terjadi di Pesantren Al Amien, Kabupaten Sumenep, Madura. Berdasarkan data di Pamekasan, Prabowo-Sandiaga unggul dengan perolehan suara lebih dari 80 persen, sementara Jokowi-Ma'ruf sekira 16-20 persen. Data tersebut masih berdasarkan data masuk Form C1 97 persen dari total 3.136 TPS di Pamekasan (per tanggal 21 April 2019).

TPS/PASLON		Jokowi – Ma’ruf Amin	Prabowo - Sandi
Pesantren Poncol	TPS 8	148 suara	4 suara
Pesantren Trenceng	TPS 4	177 suara	14 suara
Pesantren Fatihul Mubtadiin	TPS -	143 suara	37 suara
Pesantren Zainul Hasan Genggong	TPS 1	183 suara	48 suara
	TPS 5	186 suara	41 suara

Sementara itu Jokowi unggul di Pesantren Poncol, Magetan; Pesantren Trenceng, Tulungagung; Pesantren Fatihul Mubtadiin Pendem, Batu;

Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kabupaten Probolinggo. (Marika, Windi. “Ini Perolehan Suara Jokowi vs Prabowo di Beberapa Pesantren di Jatim”. Suaraindonesia.co.id)



**MAKLUMAT MASYAYIKH
PONDOK PESANTREN LIRBOYO
KOTA KEDIRI JAWA TIMUR**

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan senantiasa memohon rahmat, taufiq dan ridlo Allah SWT., Masyayikh Pondok Pesantren Lirboyo menginstruksikan kepada santri & alumni untuk;

1. Menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum 2019;
2. Menciptakan Pemilu yang aman, damai dan beradab;
3. Memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden **nomor urut 01, Bapak Ir. H. Joko Widodo & Bapak Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin.**

Lirboyo, 12 Maret 2019

Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo

Ketua Umum Pengurus Pusat
Himpunan Alumni Pesantren Lirboyo
(HIMASAL)



KH. M. ANWAR MANSYUR



KH. ABDULLOH KAFABHU MAHRUS

Sumber : [https://pilpres.tempo.co/read/1184663/pesantren-lirboyo-
keluarkan-maklumat-dukung-jokowi-maruf-amin](https://pilpres.tempo.co/read/1184663/pesantren-lirboyo-
keluarkan-maklumat-dukung-jokowi-maruf-amin)

Satu diantara pondok pesantren di Kediri yakni PonPes Lirboyo. Pengasuh PonPes Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, mengeluarkan pesan politik berupa surat maklumat yang berisi dukungan dan instruksi kepada para santri maupun alumni untuk memilih capres-cawapres nomor 01 Jokowi - Ma'ruf Amin di Pemilihan Presiden 2019 lalu. Maklumat itu diberitahukan

berwujud surat edaran yang ditandatangani langsung oleh kiai sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo. Di surat edaran yang tertanggal 12 Maret 2019 tersebut, pengasuh PonPes Lirboyo menghimbau pada para santri serta alumni di seluruh Indonesia guna memanfaatkan hak pilihnya di Pemilu 2019, mewujudkan Pemilu yang aman, damai serta beradab, sekaligus meminta para santri dan alumni guna menetapkan pasangan capres-cawapres nomor urut 01 yakni pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin. (Antara. “Pesantren Lirboyo Keluarkan Maklumat Dukung Jokowi – Ma’ruf Amin”. Pilpres.tempo.co)

TPS/PASLON		Jokowi – Ma’ruf Amin	Prabowo - Sandi
Pesantren Lirboyo	TPS 28	260 suara	4 suara
	TPS 29	277 suara	1 suara
	TPS 30	262 suara	4 suara
	TPS 32	259 suara	5 suara

Pasca pemilu 2019, perolehan suara pasangan 01 Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin amat telak di beberapa lokasi pemungutan suara (TPS) kawasan PonPes Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur, di Pemilu 2019 yang terselenggara Rabu, 17 April 2019. Secara keseluruhan di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri terdapat 17 TPS dengan jumlah pemilih yang terfokus di PonPes ini terdapat 4.493 individu. Selain memilih di pondok, terdapat pula yang memilih di TPS reguler rerata 518 santri. Tetapi, guna keseluruhan santri Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri yang memohon perpindahan memilih ialah sejumlah 5.011 orang santri. (Marzuki, Kastolani. “Di TPS Ponpes Lirboyo, Prabowo-Sandi Hanya Dapat 1 Suara”. Jatim.inews.id)

Hal ini tentu menarik setelah melihat perolehan angka kemenangan yang didapat dari masing-masing capres serta cawapres yang didukung kiai pengasuh di suatu pondok pesantren itu cukup tinggi dan jumlah suaranya terpaut jauh dari rivalnya. Terbukti para santri hampir bisa dipastikan selalu menjatuhkan pilihan politiknya sesuai dengan imbauan dari para kiai yang memang memiliki pengaruh kuat serta mempunyai otoritas besar, terutama di lingkungan pondok pesantren. Hal ini pula yang seringkali dimanfaatkan oleh para aktor politik dalam mencari dukungan kepada para kiai yang mana memiliki masa dalam jumlah besar, yang tak lain berguna untuk mengumpulkan suara pemilih dari para santri dan alumni dimana kiai itu berada.

Jika ditilik kembali, seringkali kiai dianggap sebagai pemimpin informal dan memiliki kedudukan sosial yang tinggi. Selain itu kiai juga memiliki peran ganda yakni sebagai pengasuh dan pemilik pondok pesantren, sebuah sekolah informal khas masyarakat Jawa yang sudah ada sejak dahulu yang biasanya digunakan sebagai tempat mendalami ilmu agama. Murid-murid yang belajar di pesantren seringkali dipanggil dengan sebutan santri. Setiap pendekatan-pendekatan komunikasi dalam proses belajar mengajar ilmu keagamaan yang dilakukan oleh para kiai selalu mendapat tanggapan positif dari para santri setiap harinya dan lama kelamaan menjadi sebuah kebiasaan untuk mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh kiai sebagai tokoh sentral dalam pesantren sekaligus menjadi sosok panutan bagi santri-santrinya. Jadi selain posisi sosial yang tinggi, pendekatan secara komunikasi yang dilakukan oleh kiai setiap harinya mempengaruhi para santri untuk mengikuti '*dawuh kiai*'. Kedudukan yang cukup kuat ini hampir bisa dipastikan akan membuat para santri selalu merespon positif dan mengikuti apa yang dikatakan maupun dicontohkan oleh kiai pengasuh pondok pesantren itu. Hal ini membuat kepemimpinannya diakui secara umum.

Melihat sosok kiai yang memiliki posisi yang luar biasa besarnya tentu membuat kiai menjadi salah satu kekuatan penting di dunia politik. Hal ini

juga karena kiai dianggap sebagai pembuat keputusan dalam kehidupan keagamaan maupun kehidupan politik. Keputusan kiai akan diikuti oleh para santri, bahkan oleh para alumni yang sudah lama menyelesaikan pendidikannya di pesantren. Pengaruh dan kemampuannya dalam berkomunikasi serta pendekatan-pendekatan keagamaan yang dilakukan selalu mendapat tanggapan positif dari para santri hingga alumni pondok pesantren. Sehingga tidak mengherankan jika kemudian para santri dan alumni memilih *sami'na waatho'na* dan *'manut dawuh kiai'*.

Melihat dari sini kemudian penulis memiliki anggapan bahwa studi terkait kepatuhan santri dalam mengikuti pesan politik kiai pada Pilpres 2019 lalu merupakan keadaan yang menarik serta perlu untuk diteliti dan dibahas. Mengingat peran kiai di berbagai daerah di Pulau Jawa dalam mengkampanyekan calon pilihannya cukup kuat dan menariknya, di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri, tempat yang dijadikan penulis sebagai objek penelitian ini, angka kemenangan yang didapatkan oleh capres serta cawapres yang didukung kiai pengasuh pondok tersebut terhitung cukup besar dan terpaut jauh dari rival kontestasi politik tersebut. Penelitian kepatuhan santri dalam mengikuti pesan politik kiai pada Pilpres 2019 lalu tentu menarik untuk terus dikaji keberlangsungannya.

1.2. Perumusan Masalah

Idealnya setiap warga negara berhak menentukan pilihannya pada pemilu secara independen, tidak atas dorongan atau intervensi dari orang lain. Warga negara sebagai pemilih wajib mampu memberi hak pilihnya secara bebas, aman serta rahasia. Warga negara sebagai pemilih memiliki kebebasan menentukan pilihannya sesuai hati nuraninya karena hak pilihnya dijamin oleh konstitusi. Pemilihan Umum mulai dari pemilihan calon legislatif, pemilihan kepala daerah hingga pemilihan presiden disebut

sebagai pesta demokrasi yang notabene merupakan pesta milik rakyat sebagai perwujudan dari semangat demokrasi yang berlaku di Indonesia.

Namun kenyataannya terdapat situasi bahwa ada dorongan atau imbauan dari para kiai di beberapa wilayah untuk memilih capres tertentu. Para kiai turut andil mengarahkan pilihannya ke salah satu pasangan calon presiden hingga mengeluarkan surat maklumat yang salah satu isinya yakni meminta para santri untuk memilih calon tertentu yang dipilih oleh para kiai.

Warga negara sebagai pemilih seharusnya berhak mendapatkan kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa ada dorongan atau intervensi dari pihak lain. Namun ternyata terdapat kondisi dimana sejumlah kiai dari beberapa wilayah mengeluarkan imbauan hingga surat maklumat yang isinya menginstruksikan para santri untuk memilih calon tertentu.

Dari pernyataan latarbelakang penelitian yang telah dijabarkan kemudian dirumuskan perumusan persoalan di studi ini yaitu :

- Bagaimana pesan politik yang dikeluarkan oleh kiai pengasuh pondok pesantren ini membentuk kepatuhan dari para santri pada Pilpres 2019.
- Sejauh mana kepatuhan santri dalam mengikuti pesan politik yang disampaikan oleh kiai?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ialah :

- 1.3.1. Mendeskripsikan kegiatan penyampaian pesan politik yang dilakukan oleh kiai pengasuh pondok pesantren dalam pemenangan kandidat dalam membentuk kepatuhan dari para santri pada Pilpres 2019

- 1.3.2. Mendeskripsikan sejauh mana kepatuhan santri dalam mengikuti pesan politik yang disampaikan oleh kiai pengasuh pondok pesantren.
- 1.3.3. Mengetahui faktor kepatuhan para santri dalam mengikuti pesan politik dari kiai pengasuh pondok pesantren.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis studi ini memberi penjelasan lebih lanjut dan mendalam perihal bagaimana kepatuhan santri dalam mengikuti pesan politik kiai serta proses penyampaian pesan politik oleh kiai pengasuh pondok pesantren dalam membentuk kepatuhan dari para santri pada Pilpres 2019. Sehingga harapannya penelitian ini bisa menambah bahan kajian dan memberi partisipasi guna perluasan ilmu komunikasi, utamanya dibidang komunikasi politik. Selain itu harapannya juga studi ini mampu jadi suatu acuan untuk studi yang akan dilaksanakan kemudian.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Secara praktis studi ini menggambarkan proses pemberian pesan politik yang dilaksanakan kiai pengasuh pondok pesantren serta memahami kepatuhan dari keputusan memilih para santri dalam mengikuti pesan politik kiai pada Pilpres 2019.

1.4.3. Kegunaan Sosial

Secara sosial, harapannya studi ini bisa menjadi acuan pada saat Pemilu, baik pemilihan calon legislatif maupun eksekutif tingkat daerah maupun nasional serta bagi para kandidat kontestasi politik melalui

penelitian kepatuhan santri dalam mengikuti pesan politik kiai pada Pilpres 2019.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Paradigma

Newman (1997 : 68) menyatakan bahwa Paradigma Interpretif bermula dari usaha dalam mencari penjabaran terkait kejadian sosial ataupun kultur berdasarkan dari sisi dan pengalaman orang maupun organisasi yang sedang diamati. Pendekatan interpretatif sendiri secara umum merupakan sistem sosial yang memaknai tingkah laku dan tindakan yang diuraikan secara rinci.

Pada paradirgma interpretif, realitas sosial juga dilihat sebagai hal yang tidak kaku, dapat berubah atau berkembang, kompleks dan tidak terpisah-pisah antara yang satu dengan lainnya, penuh arti serta saling berhubungan timbal baik atau berbalasan (resiprokal) dan bukan kasualitas. Realitas sosial merupakan konstruksi sosial, yang pada paradigma interpretif juga dipandang sebagai hal yang berjalan, berkembang dan penuh kandungan substansi yang subjektif. Dalam paradigma ini manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki kesadaran serta niat atau keinginan dalam bersikap maupun bertingkah laku. Paradigma ini juga memandang bahwa tindakan, uraian dan penjelasan dapat memberikan berbagai interpretasi dan dapat dimaknai melalui banyak cara. Untuk mendalami pemahaman makna sosial maka fakta adalah hal yang unik dimana memiliki konteks dan makna yang khusus serta dinamis. (Newman, 1997 : 72).

1.5.2. State of The Art

Studi serupa yang mengkaji perihal komunikasi politik kiai pernah dilakukan.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Khairul Afif B.P., mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur yang berjudul "*Komunikasi Politik Kiai dalam Penyampaian Pesan Politik kepada Masyarakat Kabupaten Situbondo*" pada tahun 2013. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa, dalam proses komunikasi politik, kiai memiliki pengaruh yang dapat menimbulkan kepatuhan masyarakat dalam menentukan sikap pada objek politik tertentu, ditumbuhkan dalam hubungan kiai dengan masyarakat Situbondo diantaranya, hubungan tarbiyah (hubungan pengajaran agama), hubungan barokah, hubungan ekonomi, dan hubungan politik. Sikap dan perilaku politik masyarakat Situbondo, terlihat jelas pada kasus perilaku dan sikap politik masyarakat Situbondo.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hasan Ma'ali, mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul "*Strategi Komunikasi Politik Kiai pada Pilpres 2014*" pada tahun 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dengan karisma dan status sosialnya, komunikasi politik kiai mampu meyakinkan publik untuk mengkampanyekan kandidat presiden ataupun calon legislatif yang dilakukan oleh tim sukses politisi dari partai manapun. Kemampuannya untuk meyakinkan pesan komunikasi kepada publik membuat orang-orang Madura ta'dzim, dan apa yang disampaikan selalu mendapat respon positif kemudian mengamininya.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Fery Hermawan, mahasiswa Ilkom Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang yang judulnya “*Pola Komunikasi Politik Kiai Pasca Pemilihan Presiden 2014 (Studi Kiai Partai Pembangunan Bangsa Kab. Pasuruan)*” pada tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi yang Kiai di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kab Pasuruan sebelum pilpres (pra pilpres) 2014 saling bersinergi. Tetapi selepas pilpres pemilihan (pasca pilpres 2014) yakni sudah timbul konflik dualisme di internal PPP. Hingga, menyebabkan berlangsungnya fragmentasi Kiai pada PPP di Kab Pasuruan. Perihal ini dikarenakan faktor basis partai yang berdasar Nahdatul Ulama (NU) selaku payung di partai ini yang memberikan kebebasan ruang gerak guna ber-ijtihad politik dikonteks furuqiyah, hingga perihal tindakan menetapkan politiknya Kiai di PPP di Kab Pasuruan mempunyai beda guna menetapkan Tindakan politiknya. Tetapi, di komunikasi yang dilaksanakan tetap guna saling menghargai, menghormati, serta saling menjaga silaturahmi.

Sejumlah penelitian yang telah dilaksanakan memiliki jenis studi yang sepadan bersama studi yang hendak dilaksanakan, namun pada dtufi Khairul Afif B.P yang judulnya Komunikasi Politik Kiai dalam Penyampaian Pesan Politik pada Masyarakat Kab Situbondo meski sama-sama membahas mengenai pesan politik pilihan politik yang dilakukan oleh kiai, terdapat perbedaan subjek penelitian dan fokus peneliti terhadap kepatuhan dalam memilih yang dilakukan oleh para santri pada Pilpres 2019.

Sedangkan pada penelitian Hasan Ma’ali yang berjudul Strategi Komunikasi Politik Kiai pada Pilpres 2014 juga memiliki pembahasan yang hampir sama yakni membahas komunikasi politik kiai, namun perbedaan pada penelitian kali ini adalah dimana

peneliti hanya membahas komunikasi politik kiai dalam penyampaian pesan politik. Peneliti sendiri tidak menyinggung strategi komunikasi politik tim sukses politisi partai terkait dalam mengkampanyekan kandidat presiden dan wakil presiden. Peneliti juga membahas kepatuhan dari para santri dalam mengikuti pesan politik yang disampaikan kiai pada Pilpres 2019.

Penelitian Fery Hermawan yang berjudul Pola Komunikasi Politik Kiai Pasca Pemilihan Presiden 2014 (Studi Kiai Partai Pembangunan Bangsa Kab. Pasuruan) memiliki perbedaan dimana Fery Hermawan meneliti pola komunikasi politik kiai yang memang memiliki hubungan dengan partai tertentu pasca Pilpres 2014. Sedangkan penelitian ini membahas pesan politik pilihan politik dari kiai yang tidak terkait dengan partai tertentu serta membahas kepatuhan dalam keputusan pemilih para santri setelah menerima pesan politik yang disampaikan kiai pada Pilpres 2019.

Dari ketiga penelitian tersebut belum ada yang mengobservasi bagaimana kiai sebagai penyampai pesan politik mengeluarkan pesan politik dan bagaimana hal tersebut membentuk kepatuhan dari para santri pada Pilpres tahun 2019. Dikarenakan hal tersebut, peneliti melakukan penelitian lebih mendalam perihal kepatuhan santri dalam mengikuti pesan politik kiai pada Pilpres 2019.

1.5.3. *Compliance Gaining Theory* (Teori Memperoleh Kepatuhan)

Menjelang pilpres 2019, sejumlah kiai menunjukkan dukungannya kepada paslon tertentu dan memberikan instruksi berisi anjuran kepada para santri maupun alumni untuk ikut memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sudah kiai sarankan. Kiai menggunakan pengaruhnya melalui cara-cara atau

strategi tertentu untuk memersuasi dan meyakinkan santri dan alumni agar patuh serta mantap untuk mengikuti pilihan kiai dalam memilih paslon yang dianggap baik, maslahat, amanah dan pantas menjadi pemimpin negara.

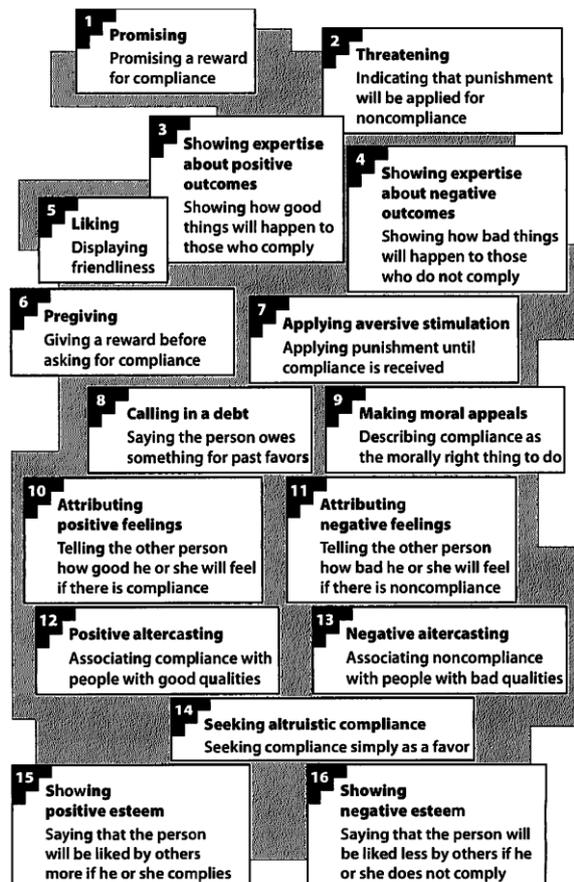
Schenck –Hamin dalam buku *Communication Yearbook* (Bostrom, 1983:114) menyebutkan bahwa, suatu strategi adalah rute konseptual dimana aktor membuat niatnya terwujud dan dimanifestasikan kepada target. Strategi mendapatkan kepatuhan secara eksplisit atau implisit berisi respon yang dimaksudkan kepada target untuk melakukan suatu tindakan dan menjadi sebuah dorongan atau persuasi dengan alasan atau motivasi untuk melakukan tindakan tersebut. *Compliance Gaining Tactic* atau strategi mendapatkan kepatuhan merupakan sebuah unit pesan verbal yang secara eksplisit maupun implisit mengusulkan suatu tindakan dan memberikan alasan atau persuasi melalui penggunaan basis kekuatan yang memiliki potensi kontrol terhadap perilaku yang dianggap berlebihan.

Selain itu, Whelees dan kelompok rekan kerjanya menyusun sejumlah strategi yang dikaitkan dengan ketiga jenis kekuasaan, yakni (1) pemilihan strategi seperti janji, hukuman, dan penghargaan; (2) pemilihan strategi seperti *emotional appeal* (daya tarik emosional), *emphatic understanding* (pemahaman untuk berempati), memuji dan lain-lain; (3) pemilihan strategi seperti *moral appeal* (seruan moral), *reason* (penjelasan), *guilt* (menunjukkan perasaan bersalah) dan lain-lain (Littlejohn, 1988:171).

Compliance Gaining atau teori mendapatkan kepatuhan merupakan alternatif yang digunakan atau yang akan dilakukan oleh individu untuk memersuasi pihak lain sehingga mereka berperilaku sesuai dengan yang individu tersebut inginkan (Aristyavani, 2017: 33). Prinsip-prinsip yang ada pada teori mendapatkan kepatuhan ini

bisa diaplikasikan untuk memengaruhi kepatuhan seseorang dalam konteks kebijakan publik maupun pada komunikasi massa di berbagai bidang, beberapa diantaranya yakni politik, hukum, psikologi, sosiologi ataupun proses komunikasi yang berfokus pada persuasi yang memengaruhi perilaku kepatuhan dan penerimaan seseorang.

Adanya kepatuhan menandakan terdapat kekuatan dari seseorang dengan kontrol, status serta kekuasaan yang lebih tinggi yang mampu membuat individu lain menjadi terpengaruh. Asumsi dasar dari kepatuhan sendiri yakni dimana pada setiap interaksi antara individu terdapat adanya hubungan kekuasaan atau “*power relationship*” yang berarti pada setiap proses terjadinya komunikasi akan selalu ada pihak yang mempengaruhi serta dipengaruhi. (Aristyavani, 2017: 153-154).



16 strategi mendapatkan kepatuhan. Sumber : (Littlejohn, 2011:156)

Terdapat 16 jenis taktik yang dikembangkan oleh Marwell dan Schmitt yang bisa dipakai oleh para pemberi pesan untuk mewujudkan kepatuhan. Dari enam belas kategori tersebut bisa disederhanakan menjadi lima jenis taktik utama (Aristyavani, 2017: 155), yakni :

1. *Rewarding activities*/ pemberian penghargaan (seperti memberikan hadiah/janji);
2. *Punishing activities*/ hukuman (seperti ancaman);
3. *Expertise*/ keahlian (seperti pengetahuan terhadap penghargaan);
4. *Personal commitments*/ komitmen personal (seperti dianggap sebagai hutang); dan
5. *Impersonal commitments*/ komitmen impersonal (seperti seruan moral).

Michael Cody, Margaret Mc. Laughlin dkk (Littlejohn, 1998:172) melakukan riset yang mana membuktikan jika *situational perception* menjadi faktor penting hampir pada setiap proses komunikasi, tidak hanya dalam proses mendapatkan kepatuhan saja. Bisa dikatakan sebagian besar reaksi yang kita tampilkan dan opsi yang kita pilih bergantung sesuai dengan keadaan yang kita hadapi. Pada riset ini pula diidentifikasi enam faktor yang mampu mempersuasi seseorang dalam strategi mendapatkan kepatuhan yang bisa digunakan oleh para pemberi pesan, yakni :

1. *Intimacy* (keintiman)

Pada situasi dimana pemberi dan penerima pesan sudah memiliki keintiman, maka komunikator akan cenderung memanfaatkan strategi yang lebih emosional dengan menunjukkan kepedulian dan empati.

2. *Dominance* (dominasi)

Pada situasi dimana individu tertentu memiliki otoritas, kedaulatan dan kekuasaan atas individu lain, contohnya pada situasi dominasi orang tua kepada anak.

3. *Right to persuade* (hak untuk membujuk)

Pada situasi-situasi tertentu, bisa diartikan individu tertentu memiliki hak untuk mempersuasi individu lain. Hal ini merujuk pada adanya kondisi lain yang jika dialami individu tersebut, ia akan berpikir dua kali untuk mempersuasi individu lainnya.

4. *Personal benefits* (keuntungan-keuntungan pribadi)

Terjadi pada situasi yang berkaitan dengan manfaat atau keuntungan apa yang akan didapatkan dari individu tertentu jika ia berusaha untuk membuat individu lainnya patuh terhadap dirinya.

5. *Relational consequences* (konsekuensi-konsekuensi dari hubungan).

Pada situasi dimana hubungan antar individu berada pada fase yang stabil, pemberi pesan dengan lebih sering akan memanfaatkan *trade off* (pertukaran).

6. *Apprehension* (kecemasan/ketegangan)

Pada situasi dimana individu pemberi pesan merasakan hadirnya kecemasan atau ketegangan, maka individu tersebut bisa memanfaatkan pesan yang disusun demi mencegah tindakan atau hal tersebut.

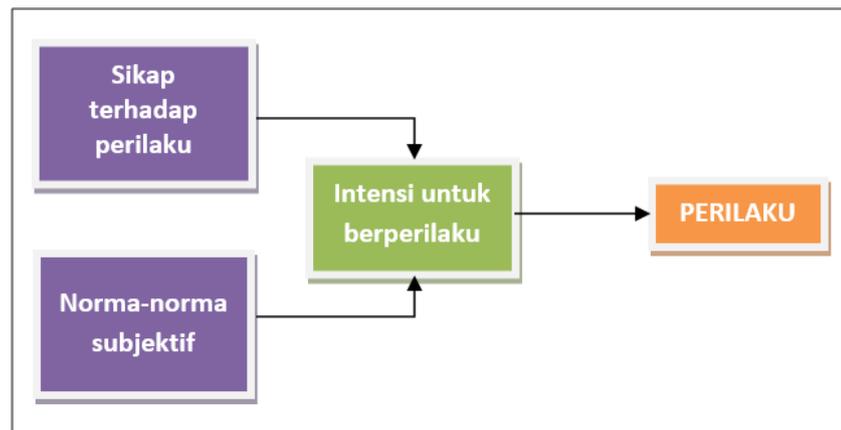
1.5.4. Teori Tindakan Beralasan (*Theory of Reasoned Action*)

Pemilihan Presiden pada tahun 2019 lalu merupakan salah satu sarana masyarakat untuk menggunakan hak pilih dalam sebuah negara demokratis yang dilaksanakan langsung, bebas serta rahasia setelah sebelumnya mulai dilaksanakan ditahun 2004. Perihal ini tentunya mendorong para aktor politik mencari jalan dalam rangka memperoleh dukungan rakyat, salah satunya yakni melalui

penyampaian pesan politik kepada masyarakat sebagai penerima pesan politik yang nantinya akan membentuk sikap dan perilaku patuh dalam pengambilan keputusan dari para pemilih pada kontestasi politik 5 tahun-an ini.

Dalam bukunya, Azwar (2008:11-12) menyatakan bahwa teori tindakan beralasan (*Theory of Reasoned Action*) menjelaskan perihal sikap yang mempengaruhi perilaku melalui suatu tindakan pengambilan keputusan yang detail dan didasari oleh argumen tertentu oleh individu terkait. Hasil akibatnya terbatas di 3 perihal, yakni perilaku individu lebih ditetapkan sikap tertentu yang spesifik dan berhubungan terhadap hal tersebut; lalu, perilaku tak dipengaruhi sikap saja namun oleh sejumlah norma subjektif (*subjective norms*) yang mana merupakan keyakinan dan persepsi dari individu akan apa yang individu lainnya kehendaki supaya orang itu laksanakan; ketiga, sikap atas sebuah perilaku yang beriringan bersama keyakinan atau norma subjektif individu menghasilkan niat untuk berperilaku ataupun tidak melakukan sesuatu hal tertentu.

Aspek personal yakni sikap individu atas suatu perilaku dan norma subjektif yakni pandangan orang atas tekanan sosial guna berperilaku dengan melaksanakan ataupun tak melaksanakan sesuatu hal yang nantinya akan menghasilkan intensi untuk berperilaku tertentu. Dengan lebih jelasnya, teori tindakan beralasan menerangkan perilaku seorang individu yang dipengaruhi dari pandangan positif dari dirinya sendiri akan perbuatan tersebut dan keyakinan individu bahwa sejatinya orang lain ingin agar ia melakukan hal tersebut.



Model TRA. Sumber : (Azwar, 2008:12)

Fishbein (1967) berpendapat bahwa bahasan teori Tindakan beralasan (*Theory of Reasoned Action*) berguna untuk menjelaskan lebih mendalam terkait hubungan antara sikap (*attitudes*), niat (*intentions*) dan perilaku (*behaviors*). Secara jelas, teori tindakan beralasan berhasil mengungkapkan sejauh mana perilaku individu berada dibawah kontrol dirinya sendiri. Teori ini menekankan bahwa intensi dalam berperilaku menjadi penentu yang paling penting. Sikap individu atas perilaku diri mereka bersamaan dengan norma subjektif yang mereka yakini atas tindakan tersebut menjadi determinan dari niat individu dalam bertindak. (Glanz, 2008:70)

Jogiyanto berpendapat (2007:35) bahwa teori tindakan beralasan mengungkapkan proses manusia dalam berperilaku. Asumsi awalnya perilaku ditentukan oleh intensi atau niat, kemudian dengan penjelasan lebih lanjut intensi tersebut dipengaruhi oleh sikap individu itu sendiri terhadap perilaku yang bersamaan dengan keyakinan tentang konsekuensi dalam bertindak serta ekspektasi-ekspektasi normatif dari orang lain terhadap individu tersebut guna melaksanakan ataupun tak melaksanakan sesuatu, atau yang kerap dinamai norma subjektif. Artinya perilaku individu bisa dijelaskan dengan memperhitungkan keyakinan-keyakinannya. Hal ini dikarenakan keyakinan individu

merepresentasikan info dan keterangan yang mereka dapatkan mengenai diri mereka sendiri serta mengenai perihal yang ada di sekitar mereka, yang bisa diartikan bahwa informasi tersebut menentukan perilaku individu.

1.5.5. Kepatuhan

Kepatuhan merupakan suatu bentuk penyerahan, kerelaan dalam mengikuti suatu harapan atau perintah dari orang lain. Aktivitas pengeluaran pesan politik pilihan politik oleh kiai pengasuh pondok pesantren mengharapkan adanya kepatuhan dari para santri dalam mengikuti pesan politik pilihan politik pada pilpres 2019.

Kepatuhan merupakan ukuran seseorang dalam mematuhi, mentaati dan melakukan suatu aturan atau tindakan yang dianjurkan (Smet, 1994; 250). Kepatuhan juga bisa diartikan sebagai kesukarelaan dalam melakukan sesuatu secara sepenuhnya, tulus serta ikhlas mengalah maupun menyerah dan menyesuaikan diri dengan hasrat atau keinginan orang lain (Chaplin, 1989; 99).

Kepatuhan adalah menerima dan melakukan aturan yang disampaikan oleh orang lain yang bisa terjadi dalam bentuk apapun selama seseorang tersebut menunjukkan dirinya mentaati suatu aturan atau instruksi dari orang lain. (Blass, 1999; 957)

1.5.6. Santri

Santri merupakan murid yang menetap dalam suatu pesantren dalam mendalami ilmu agama. Pada aktivitas pengeluaran pesan politik pilihan politik oleh kiai pengasuh pondok pesantren, santri merupakan sasaran sebagai penerima pesan politik yang diharapkan patuh serta berperilaku selaras bersama apa yang dikehendaki kiai.

Santri merupakan julukan atau sebutan identitas untuk individu yang sedang mencari ilmu agama di pondok pesantren. Kata *shastra* yang bermakna buku-buku suci yang berisikan ilmu pengetahuan atau buku-buku agama menjadi pangkal dari sebutan kata santri sehingga santri bisa diartikan sebagai orang yang mengaji, menuntut atau mendalami ilmu agama yang berasal kitab-kitab suci. (Mu'awanah, 2009; 25)

Pada proses menimba ilmu selama di pesantren, para santri tidak terikat oleh waktu dikarenakan niat mereka yang selalu mengutamakan ibadah dan menganggap menuntut ilmu juga menjadi bagian dari ibadah. Santri-santri ini tinggal di suatu tempat yang sering disebut dengan pondok. Sebagian besar kegiatan para santri sehari-harinya berpusat di pondok tersebut dimana tempat tersebut hampir serupa dengan asrama biara. Tidak hanya mengaji dan beribadah tetapi juga kegiatan harian seperti memasak maupun mencuci pakaian. Arifin (1993) mengutip Anderson menyatakan bahwa para santri yang sudah menjadi bagian dari pondok pesantren nantinya bakal menghadapi masa peralihan dimana mereka akan memasuki suasana perguruan keagamaan dan mendalami ilmu-ilmu pengetahuan agama serta menjalani kehidupan spiritualias secara murni sesuai dengan arahan kiai, termasuk ikut serta dalam kegiatan sosial maupun keagamaan di lingkungan pondok pesantren. Mereka akan menjalani kehidupan sederhana ala santri pondok pesantren pada umumnya tanpa ada perbedaan derajat satu sama lain, setara, dan iklim sosial yang tinggi. Nantinya mereka hidup bersama-sama dan membentuk ikatan persaudaraan dengan tingkat solidaritas yang kokoh sebagai bagian dari kehidupan santri di pondok pesantren. Usman (1988) berpendapat bahwa dirinya memandang perkembangan kehidupan santri sebagai proses pelepasan dari kehidupan keluarga asal ke dalam kehidupan yang baru, yakni kehidupan pesantren dan para santri akan menjalani proses

sosialisasi dalam menemukan kodrat, karakter dan kepribadian dirinya yang sebenarnya. (Mubaraq, 2012:10)

Dhofier (2015:88-89) menjelaskan bahwa berdasarkan pemahaman yang biasa digunakan dalam lingkungan kehidupan pondok pesantren, seorang alim atau orang yang menguasai ilmu agama cuma mampu dinamai kiai jika orang tersebut mempunyai PonPes dengan para santri yang tinggal di dalam asrama dan berkegiatan, terutama dalam aktivitas beribadah dan mengkaji kitab Islam klasik. Maka santri menjadi bagian penting di kelembagaan PonPes. Secara tradisi, santri sendiri terbagi menjadi dua :

1. Santri mukim, yakni para siswa yang menetap sebagai anggota pesantren dan tinggal di dalam pondok. Santri mukim kebanyakan asalnya dari daerah yang jauh dari PonPes lokasi mereka menuntut ilmu agama. Biasanya santri mukim dengan durasi tinggal yang paling lama di PonPes akan menjadi satu golongan tersendiri dan memikul tanggungjawab untuk mengurus segala kepentingan madrasah maupun para santri sehari-harinya. Biasanya mereka juga memiliki peran untuk ikut mengajar para santri yang lebih muda perihal kitab-kitab dasar hingga menengah. Pada umumnya para putra-putri kiai dari pesantren-pesantren yang tersebar di berbagai pelosok daerah akan belajar ilmu agama dan tinggal di pondok pesantren yang besar dan dikenal masyhur.
2. Santri kalong, yakni murid yang tidak tinggal menetap dan asalnya dari desa disekeliling lingkungan pondok pesantren. Sehari-harinya mereka akan bolak-balik pulang-pergi (*nglaju*) dari

rumah masing-masing untuk mengikuti sekolah madrasah dan kegiatan pengajian yang ada di pesantren. Umumnya perbedaan antara pondok pesantren kecil dan besar bisa diamati dari jumlah santri kalong didalamnya. Pondok pesantren besar biasanya mempunyai jumlah santri mukim yang lebih banyak ketimbang santri kalong, sedangkan pada pondok pesantren kecil jumlah santri kalong lebih besar ketimbang santri mukim.

1.5.7. Pesan politik (Politik)

Pesan politik merupakan isi dan inti dari aktivitas komunikasi politik untuk memengaruhi penerima pesan sebagai sasarannya sehingga mereka melakukan apa yang dimaksudkan dan diinginkan oleh para aktor politik.

Pada komunikasi politik, pesan menjadi sebuah kekuatan yang sangat penting dan tidak bisa dikesampingkan mengingat setiap proses komunikasi memiliki isi gagasan pesan didalamnya. Pesan adalah isi (*content*) dan pesan ialah raja (*content is the king*). Pesan berisi ide-ide gagasan dari apa yang dikomunikasikan atau disampaikan. Dalam proses komunikasi, pesan mendefinisikan pemahaman khalayak terhadap ide gagasan yang dikatakan. (Efriza & Jerry Indrawan, 2018: 90)

Menurut Subiakto (2015; 46-47) pesan adalah muatan atau kandungan isi dari proses komunikasi, termasuk pada komunikasi politik. Pada praktik sejarah dari komunikasi politik, pesan menjadi senjata jitu untuk membujuk atau mempersuasi penerima pesan yang menjadi segmentasi dari proses penyampaian komunikasi politik. Pesan berperan menjadi inti muatan dari komunikasi. Aristoteles menjelaskan jika pesan pada proses komunikasi memiliki kekuatan untuk mengungkapkan ide, gagasan, pendapat nilai ideologi dan lain sebagainya dari para komunikator, khususnya pada komunikasi

persuasi yang berguna untuk mempersuasi atau merayu individu lain agar bertindak sesuai dengan keinginan dari komunikator. Pesan berperan menjadi inti muatan dari komunikasi yang telah dilakukan. Makna pesan dapat menjadi positif maupun negative bergantung pada persepsi pemaknaan dari para penerima pesan dalam memaknai pesan yang sudah dikomunikasikan.

Pada Kamus Umum Bahasa Indonesia Badudu dan Zain (1996) menginterpretasikan politik selaku berbagai ragam upaya dalam perkara ketatanegaraan yang berhubungan dengan pengendalian pemerintahan dan kenegaraan, termasuk sistem serta siasat didalamnya. Tidak hanya berkutat pada permasalahan di dalam negeri tapi juga urusan di luar negeri. Politik juga bisa dijelaskan sebagai usaha, siasat, usaha atau tipu muslihat (Matulesy, 2018: 6).

Harold D Lasswell (1963) menyatakan formula terkait politik sebagai “*who, gets what, when, how*” yang bisa diartikan politik ialah siapa mendapat apa, kapan, serta bagaimana cara untuk mendapatkannya. Dengan begitu bisa dijelaskan lebih lanjut bahwa manusia mememakai pengaruh (*influence*), wewenang (*authority*), kekuasaan (*power*) serta kekuatan (*force*) untuk melakukan suatu kegiatan politik pada waktu yang sudah ditentukan demi mendapatkan tujuan politik. (Arifin, 2011: 106)

Sementara itu Surbakti menyatakan ada lima pandangan tentang politik, yakni :

1. Politik merupakan sejumlah cara yang dilakukan oleh warga negara dalam rangka membahas, menelaah dan mengupayakan kemaslahatan untuk semua lapisan masyarakat.
2. Politik merupakan segala sesuatu yang bersangkutan dengan pelaksanaan pemerintahan dan kenegaraan.

3. Politik menjadi upaya yang berperan dalam mendapatkan dukungan dari masyarakat dan usaha untuk memperjuangkan serta melanggengkan kekuasaan.
4. Politik menjadi usaha yang berasosiasi dengan pencetusan, perwujudan dan pelaksanaan kebijakan hukum.
5. Politik menjadi sebuah konflik sebagai upaya mendapatkan dan melanggengkan berbagai sumber fundamental yang dirasa penting dan diperlukan. (Matulesy, 2018: 7).

Pesan politik ialah muatan dari proses komunikasi yang disampaikan secara tertulis maupun tidak tertulis, dinyatakan secara langsung ataupun tak langsung, secara sadar ataupun tak disadari, secara tersirat maupun tersurat yang membahas perihal urusan politik (Muslimin, 2019: 25).

Pesan politik atau bahasan perihal politik dapat diartikan dimana para pemimpin ataupun komunikator politik seperti anggota partai politik, akademisi profesional, anggota pemerintahan hingga warga negara yang memposisikan diri mereka selaku penyalur pesan komunikasi politik serta menyampaikannya kepada penerima pesan komunikasi politik. Evolusi bahasan perihal politik menjadi gambaran metamorfosis pemikiran politik masyarakat yang membentuk nilai-nilai yang mempengaruhi pilihan politik sesuai keyakinan individu. Sehingga bisa disimpulkan politik merupakan bahasan yang berkaitan dengan pemerintahan, kekuasaan, kekuatan, pengaruh dan konflik. Pembahasan politik sendiri merupakan bahasan yang membicarakan tentang upaya melanggengkan dan membantu urusan lain yang berkaitan dengan pemerintahan, kekuasaan, kekuatan, pengaruh dan konflik.

Sedangkan pesan politik adalah muatan kata atau inti dalam bahasan politik yang dihasilkan dari proses komunikasi. Ditilik dari segi bahasa, pesan politik bisa diartikan sebagai suatu sistem yang berasal dari gabungan simbol-simbol maupun kata-kata yang relevan dan substansial. Ada banyak cara dalam upaya penyampaian pesan politik, termasuk melalui simbol, gambar, karikatur hingga pesan yang membahas perihal politik yang disampaikan langsung kepada penerima pesan politik. (Pureklolon, 2016: 41)

1.5.8. Kiai

Sebagai sosok yang dituakan dan dihormati, kiai memiliki pengaruh luar biasa dengan otoritas yang besar khususnya di lingkungan pondok pesantren. Kepemimpinannya diakui oleh santri dan alumni dari pondok pesantren asuhannya hingga warga setempat. Keputusan yang dibuat oleh kiai akan diikuti oleh para santri hingga alumni pondok pesantren tempat kiai itu berada.

Kiai sendiri merupakan julukan atau sebutan identitas yang disematkan kepada seorang ulama yang alim atau menguasai keilmuan dalam bidang agama Islam. Sebutan ini dikhususkan kepada seorang figur yang memang berkapasitas dan berkapabilitas dalam penguasaan ilmu agama Islam. Zamakhsari Dhofier berpendapat bahwa gelar kiai tidak diberikan kepada orang sembarangan melainkan masyarakat akan menyematkan sebutan kiai kepada sosok yang ahli dalam bidang keilmuan agama Islam serta menjadi pengasuh sekaligus pemimpin dari pondok pesantren dan mengajarkan kitab Islam klasik ataupun kerap dinamai kitab kuning kepada santri-santrinya. Tidak hanya itu, kiai juga memiliki peran yang cukup besar dan ikut andil terhadap perubahan sosial di dunia pesantren serta masyarakat di lingkungan sekitar. (Patoni, 2007; 20-24)

Pada kehidupan pesantren, kiai memiliki kedudukan sebagai sosok sentral dan menjadi pusat dari kehidupan pesantren sekaligus pengasuh dan pemimpin dari pondok pesantren. Sebutan kiai asalnya dari Bahasa Jawa yang berarti agung, keramat, serta dituahkan. Penyematan gelar ini disematkan pada sosok kiai yang sudah berusia lanjut dengan karakter yang arif dan bijaksana serta dihormati santri serta rakyat disekelilingnya. Meskipun begitu definisi paling luas di Indonesia dari julukan kiai biasanya diperuntukkan kepada pendiri serta pemimpin PonPes yang sudah mengabdikan diri dengan berdakwah dan mendalami ajaran-ajaran agama Islam melalui aktivitas-aktivitas keagamaan dan pendidikan di pondok pesantren. Sosok kiai akan memperuntukkan sebagian besar hidupnya untuk Allah. (Mu'awanah, 2009; 24-25)

Pada umumnya di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah, kiai menjadi sebutan untuk ulama yang memimpin dan mengasuh suatu pondok pesantren. Namun peruntukan sebutan ini di zaman sekarang sudah agak bergeser dimana kiai juga menjadi gelar untuk ulama-ulama yang memiliki pengaruh di mata masyarakat meskipun mereka tidak menjadi pemimpin di pondok pesantren. Sebutan atau pemberian gelar ini sudah menjadi bagian dari tradisi pesantren yang kuat dimana identitas kiai diperuntukkan kepada ulama-ulama yang berasal dari kelompok Islam tradisional. Menurut asal usulnya sendiri sebutan kiai diambil dari bahasa Jawa yang dipakai guna 3 macam gelar berbeda :

1. Kiai digunakan selaku gelar kehormatan yang diperuntukkan untuk barang yang dikeramatkan, salah satunya “Kiai Garuda Kencana” yang menjadi sebutan guna Kereta Emas yang terdapat di keraton Yogyakarta;
2. Gelar kiai pada umumnya diperuntukkan sebagai sebutan kehormatan bagi orang-orang yang dituakan;

3. Masyarakat memberikan gelar kiai kepada seseorang yang berkapasitas dan berkapabilitas dalam keilmuan agama Islam, yakni sosok yang alim (menguasai ilmu pengetahuan agama Islam) dimana kiai tersebut menjadi pemilik, pengasuh serta pemimpin dari suatu pondok pesantren dan mengajarkan kitab klasik ataupun kerap dinamai kitab kuning kepada santri-santrinya. (Mubaraq, 2012:2-3)

1.5.9. Pemilihan Umum Presiden

Pemilihan Umum atau pemilu ialah wadah sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Hal ini merujuk pada sistem politik demokrasi yang dianut oleh negara Republik Indonesia. UU No.7 Tahun 2017 menjabarkan Pemilihan Umum yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali berperan sebagai sarana rakyat guna menetapkan Presiden serta Wapres, anggota DPR, DPD serta DPRD. Penyelenggaraan pemilu ini didasari atas asas luberjudil atau langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil sehingga nantinya pemerintah mampu menjalankan fungsi kekuasaan demi mencapai tujuan nasional seperti yang diamantkan pada pembukaan UUD NKRI Tahun 1945.

Salah satu pengamat politik yakni Indria Samego (Efriza, 2012; 359) menjelaskan bahwa pemilihan umum atau pemilu juga dapat disebut dengan "*Political Market*" dimana bisa diartikan jika pemilu merupakan pasar politik yang menjadi wadah perorangan hingga masyarakat untuk saling berinteraksi dan menjalankan kontrak sosial atau bisa disebut dengan perjanjian masyarakat antara partai politik atau peserta pemilu dengan rakyat atau pemilih pada pemilu (pemilik hak pilih) setelah sebelumnya mereka melalui rangkaian kegiatan politik seperti kampanye secara langsung maupun persuasi lewat iklan-iklan politik yang berbentuk seperti selebaran, spanduk, pamphlet yang tersebar melalui berbagai media

cetak, audio, dan audio visual hingga proses komunikasi antar pribadi yang disampaikan secara langsung dan *face to face* atau pendekatan secara tidak resmi bermuatan janji-janji politik untuk memengaruhi dan meyakinkan para pemilik hak suara sehingga pada saat pemilu mereka bisa menentukan pilihan kepada salah satu peserta pemilihan umum (partai politik).

Menurut Paimin Napitulu (Efriza, 2012; 358), pemilihan umum atau pemilu merupakan momen dimana masyarakat melakukan aktivitas politik dengan memilih figur individu ataupun kelompok untuk menjabat sebagai pemimpin rakyat, negara atau pemerintahan. Rakyat melalui pemilu menghadirkan calon pemimpin rakyat, negara atau pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dipilih oleh rakyat yang sudah menggunakan hak pilihnya. Proses pemilu terjadi dimana seluruh lapisan masyarakat memiliki hak untuk melakukan pemilihan kepada individu atau kelompok untuk menjadi pemimpin mereka. Dengan begitu bisa dikatakan bahwa pemilu merupakan sebuah mekanisme politik yang digunakan untuk pengekspresian pendapat, opini dan keinginan masyarakat dalam proses pemilihan sebagian rakyat untuk menjadi pemimpin rakyat, negara atau pemerintahan.

Pemilu atau pemilihan umum dianggap sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang merdeka dan bebas dalam memilih pemimpin melalui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Pemilu sendiri menjadi salah satu pilar utama dari akumulasi kemauan dan harapan rakyat sekaligus sarana utama untuk mewujudkan demokrasi dalam suatu negara melalui hak pilih yang dimiliki rakyat, yakni hak memilih kandidat untuk mewakilinya di pemerintahan. Hal ini dikarenakan negara demokratis akan memberikan ruang bagi rakyat untuk terlibat dalam pemilihan kandidat untuk mengisi jabatan-jabatan publik.

1.6. Operasionalisasi Konsep

Dalam upaya memperoleh data terkait perihal kepatuhan santri dalam mengikuti pesan politik kiai pada pilpres 2019, diperlukan adanya deskripsi tematis yang bermuatan konsep-konsep dalam penelitian. Supaya konsep tersebut bisa selaras atau sesuai dengan penelitian, maka dapat dioperasionalisasikan sebagai berikut :

1.6.1. Kepatuhan Santri dalam Mengikuti Pesan politik Kiai

Kepatuhan merupakan suatu bentuk sikap dan perilaku penyerahan, kerelaan dalam mengikuti suatu harapan atau perintah dari orang lain. Sedangkan santri adalah julukan atau sebutan untuk para siswa yang memperlajari ilmu agama Islam dalam sebuah PonPes yang tak terikat waktu dalam proses belajar dan mereka masuk dalam suasana perguruan kebiaraan atau asrama dengan kemungkinan mendalami ilmu keagamaan, melakukan kehidupan spiritualitas atau batin yang murni, dan atas instruksi kiai mereka mengerjakan tugas sehari-hari, bekerja dilahan pesantren dan ikut memiliki andil dikehidupan keagamaan tak cuma di area PonPes namun pula di lingkungan warga sekitar.

Pesan Politik sebagai inti dari komunikasi politik adalah informasi yang disampaikan dengan lambang bermakna yang berisi pikiran atau perasaan komunikator terkait politik. Pesan politik yang dilakukan oleh kiai dalam komunikasi politik pun tidak bisa diabaikan karena pesan adalah isi, apa yang ingin disampaikan oleh komunikan. Pesan politik berguna untuk memengaruhi, merayu atau memersuasi komunikan atau penerima pesan politik yang menjadi target dalam kegiatan komunikasi politik, dimana pada kasus ini santri menjadi pihak penerima pesan politik dalam komunikasi politik yang dilakukan oleh kiai. Pesan politik yang disampaikan

oleh kiai memiliki kekuatan untuk membujuk para santri agar bersikap dan bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kiai.

Kiai dalam dunia pesantren merupakan orang yang dianggap alim dan dinilai oleh masyarakat memiliki keunggulan dibidang ilmu agama dibanding individu umumnya. Kiai juga merupakan tokoh sentral sekaligus pemimpin dalam suatu pondok pesantren dan menjadi panutan bagi santri yang tengah menjalani pendidikan di PonPes asuhan kiai itu. Kiai tentunya memiliki pengaruh yang luar biasa kuat dan mempunyai otoritas yang besar karena seringkali kiai dianggap sebagai pembuat keputusan dalam kehidupan keagamaan maupun kehidupan politik. Melihat hal ini, kiai menjadi kekuatan penting di dunia politik. Sebagai tokoh sentral, pemimpin hingga panutan para santri, keputusan kiai akan diikuti oleh para santri, bahkan oleh para alumni yang sudah lama menyelesaikan pendidikannya dari pondok pesantren.

Kepatuhan yang dilakukan oleh santri dalam mengikuti pesan politik yang dikeluarkan oleh kiai pengasuh pondok pesantren pada suatu kontestasi politik merupakan hal yang diharapkan dalam rangka memenangkan kandidat pilihan. Kepatuhan ini tentunya dicapai melalui pertimbangan dan menghasilkan suatu keputusan dari sejumlah alternatif yang ada oleh para siswa yang mendalami ilmu agama dalam sebuah pesantren pada pemilihan presiden dan wakil presiden sebagai wadah atau sarana mewujudkan kedaulatan rakyat pada tahun 2019 lalu.

1.6.2. Pesan politik Kiai pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019

Pesan Politik adalah informasi yang disampaikan dengan lambang bermakna yang berisi pikiran atau perasaan komunikator terkait politik.

Kiai dalam dunia pesantren merupakan orang yang dianggap alim dan dinilai oleh masyarakat memiliki keunggulan dalam penguasaan bidang ilmu agama Islam yang lebih dibandingkan dengan orang-orang pada umumnya. Kiai juga merupakan tokoh sentral sekaligus pemimpin dalam suatu pondok pesantren dan menjadi panutan bagi para santri yang tengah mengenyam pendidikan agama di PonPes asuhannya. Kiai tentunya memiliki pengaruh yang luar biasa kuat dan mempunyai otoritas yang besar karena seringkali kiai dianggap sebagai pembuat keputusan dalam kehidupan keagamaan maupun kehidupan politik. Melihat hal ini, kiai menjadi kekuatan penting di dunia politik. Sebagai tokoh sentral, pemimpin hingga panutan para santri, keputusan kiai akan diikuti oleh para santri, bahkan oleh para alumni yang sudah lama menyelesaikan pendidikannya dari pondok pesantren.

Pemilihan Umum Presiden atau pilpres merupakan wadah dalam rangka realisasi dan mewujudkan kedaulatan rakyat yang merdeka dan bebas dalam memilih pemimpin melalui Pemilihan Presiden serta Wapres secara langsung di negara yang mengikuti sistem demokrasi. Hal ini demi memberikan ruang untuk warga negara guna menetapkan pemimpin negara dan pemerintahan untuk mengisi jabatan publik.

Jadi, pesan politik yang dikeluarkan oleh kiai di pondok pesantren pada pilpres 2019 memiliki andil penting karena biasanya terdapat ratusan hingga ribuan santri yang menjalani pendidikan ilmu agama di dalam PonPes. Jumlah yang cukup besar untuk menambah perolehan suara bagi kandidat yang bersaing dalam kontestasi politik. Pesan politik yang disampaikan kiai memiliki kekuatan untuk membujuk para santri untuk patuh sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kiai.

1.7. Metoda Penelitian

1.7.1. Desain Penelitian

Pada studi ini peneliti memakai tipe studi kualitatif deskriptif bersama pendekatan studi kasus. Penelitian ini dimaksudkan untuk menangkap dan mengerti kejadian perihal apa yang dialami subjek studi misalnya pandangan, aksi, perilaku serta hal-hal lain bersama cara pandang yang menyeluruh atau holistik dan menggunakan deskripsi berwujud pernyataan kata atau bahasa, dikonteks spesifik dan khususnya yang alamiah memakai sejumlah metode alamiah (Moleong, 2017 : 6). Pendekatan studi kasus sendiri menjadi strategi yang tepat dan sesuai dengan pokok pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” serta peneliti sendiri tidak memiliki peluang yang besar untuk mengatur maupun mengontrol sejumlah peristiwa yang akan diteliti serta penelitian yang diteliti terhitung sebagai kejadian kontemporer (masa kini) dikonteks kehidupan yang nyata. (Yin , 2014 : 1-2).

Penelitian ini berfokus pada pertanyaan pokok, yakni “bagaimana” dan “mengapa” meski tidak menutup adanya kemungkinan untuk memanfaatkan pertanyaan “apa”, “siapa, “dimana” sebagai upaya membentuk deskriptif. Pemilihan pendekatan studi kasus dikarenakan metode penelitian ini paling tepat dan sesuai untuk digunakan dalam menganalisa kepatuhan santri dalam mengikuti pesan politik kiai dan memiliki keunikan sendiri karena memiliki latar belakang politik, sosial serta budaya yang masih relevan untuk diteliti dan dibahas pada setiap kontestasi politik lembaga legislatif dan eksekutif tingkat daerah maupun nasional.

1.7.2. Situs Penelitian

Studi akan dilaksanakan di Kediri, yakni bertempat di Pondok Pesantren Lirboyo, tempat penyampaian pesan politik kiai kepada para santri di pondok pesantren pada Pemilihan Presiden tahun 2019 lalu.

1.7.3. Subjek Penelitian

Subjek studi dari studi ini adalah Kiai Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo sebagai pelaku penyampai pesan politik, santri yang sedang mengenyam pendidikan ilmu agama Islam di PonPes Lirboyo dan alumni Pondok Pesantren Lirboyo yang sudah menyelesaikan pendidikannya di atas rentang waktu 6 tahun sebagai penerima pesan politik sekaligus pemilih yang berpartisipasi pada Pemilihan Presiden tahun 2019 lalu.

1.7.4. Jenis Data

Studi kualitatif ialah data berwujud pernyataan kata, bahasa maupun simbol yang mendeskripsikan serta mewakili kepatuhan yang dilakukan oleh santri dalam mengikuti pesan politik kiai dan pesan politik yang disampaikan oleh kiai pondok pesantren pada kontestasi politik Pemilihan Presiden tahun 2019 lalu.

1.7.5. Sumber Data

Sumber data yang didapat nantinya akan digolongkan jadi 2, ialah data primer serta sekunder.

- Data Primer

Di studi ini data primer didapat melalui observasi serta wawancara langsung bersama subjek studi yang sudah ditentukan.

- Data Sekunder

Data sekunder di studi ini didapat dari dokumen-dokumen dan studi pustaka, termasuk buku, jurnal studi terlebih dahulu dan internet. Data sekunder ini digunakan sebagai pendukung dari sumber data primer.

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Pada studi kasus ada 6 sumber bukti pada pengumpulan data yang bisa dimanfaatkan sebagai fokus dari penghimpunan data studi kasus ialah berkas, rekaman, arsip, interview, pengamatan langsung serta perangkat fisik (Yin , 2014 : 103). Studi ini memakai studi kasus dengan melakukan wawancara secara mendalam. Teknik *indepth interview* ini dimanfaatkan sebagai upaya untuk memperoleh data dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah tersusun secara sistematis. Alat pengumpul data pada penelitian ini yakni menggunakan *interview guide* atau pedoman wawancara untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan dari para narasumber penelitian. Hal ini menjadi media yang paling efektif dalam rangka memahami kepatuhan yang dilakukan oleh para santri sebagai penerima pesan politik dalam mengikuti pesan politik yang telah disampaikan oleh kiai Pondok Pesantren Lirboyo pada Pilpres tahun 2019 .

1.7.7. Analisis dan Interpretasi Data

Teknik analisis data yang dipakai di studi ini ialah mengarah ke konsep Milles & Huberman (1992: 20) yakni *interactive model* yang menggolongkan analisis data di 3 prosedur, yakni :

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang merujuk dikonsep Milles & Huberman (1992: 20) ialah model

interaktif dengan menggolongkan analisa data kedalam 3 tahap, ialah :

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses penyaringan serta pemusatan atensi di penyederhanaan, pengabstrakan serta proses perubahan data kasar yang didapatkan dari catatan tertulis selama dilapangan.

2. Penyajian data (*Display Data*)

Setelah penyaringan data, maka dilakukan sajian data dimana data tersusun hingga menciptakan adanya ruang kemungkinan pembuatan konklusi serta penetapan aksi. Pada umumnya wujud yang biasa dipakai yakni dalam bentuk teks naratif yang menceritakan rangkaian peristiwa.

3. Penarikan kesimpulan (*Verifikasi*)

Studi ini nantinya hendak mengungkap arti dari data-data yang sudah diperoleh. Kemudian dari data itu hendak didapatkan konklusi yang tentatif, kabur serta meragukan hingga butuh adanya verifikasi dari kesimpulan tersebut. Verifikasi konklusi dilaksanakan lewat memeriksa kembali reduksi data serta data yang sudah ditampilkan agar tak terjadi penyimpangan dari penarikan kesimpulan.

- 1.7.1. Kualitas Data (*Goodness Criteria*)

Penelitian memerlukan adanya teknik pemeriksaan dalam menetapkan kualitas data (Moleong, 2010:324). Empat tolak ukur yang dipakai di studi ini ialah :

1. Derajat kepercayaan (*credibility*)

Kevalidan atau keshahihan dari penelitian ini dapat dipercaya.

2. Keteralihan (*transferability*)

Generalisasi akan temuan bisa berlaku dan diaplikasikan pada semua konteks.

3. Kebergantungan (*dependability*)

Apabila dilaksanakan pengulangan penelitian dan mendapatkan hasil yang sama maka bisa diartikan realibilitasnya tercapai.

4. Kepastian (*confirmability*)

Apabila beberapa orang menyepakati penelitian ini bersifat objektif, dengan itu hasil dari penelitian tersebut faktual dan dapat dipercaya kepastiannya.